

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DAN IMPLIKASINYA BAGI KEMANDIRIAN KESEHATAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Luthfia Bakari¹, Yahya Antu², Andi Yusuf Katili
Universitas Bina Taruna Gorontalo

bakariluthfia@gmail.com¹, yahyaantu03@gmail.com²,
yusuf2801@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dan implikasinya bagi kemandirian kesehatan daerah Provinsi Gorontalo. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan percepatan pencegahan penanggulangan stunting dan implikasinya kebijakan terhadap kemandirian kesehatan. Populasi ditetapkan secara purposive sampling dan pengambilan sampelnya secara purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu melakukan identifikasi berkaitan dengan implementasi kebijakan percepatan pencegahan penanggulangan stunting dan implikasinya kebijakan terhadap kemandirian kesehatan. Secara umum implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik. kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting lebih menekankan kepada aspek komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran serta masyarakat sebagai isu utama. Pemerintah kabupaten Bone Bolango diharapkan agar tetap menjaga komitmen dalam mengatasi masalah stunting dengan cara meningkatkan koordinasi pada semua perangkat daerah yang terkait dengan stunting. Dibutuhkan pendidikan publik tentang pentingnya makan makanan bergizi dengan pola gizi seimbang. Perbaikan dari sisi hilir, yaitu dengan peningkatan hasil produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya pertanian, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Stunting, Implikasi, Kemandirian

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy to accelerate stunting prevention and control in Bone Bolango Regency and its implications for regional health independence in Gorontalo Province. The focus of this research is the implementation of policies to accelerate stunting prevention and the implications of policies on health independence. The population is determined by purposive sampling and purposive sampling. The data analysis used is a qualitative descriptive method, namely identifying related to the implementation of policies to accelerate stunting prevention and the implications of policies for health independence. In general, the implementation of stunting prevention social policies in Bone Bolango Regency has been going well. The stunting prevention and control policy emphasizes aspects of commitment and responsibility of local governments and community participation as the main issues. The Bone Bolango district government is expected to maintain its commitment to overcome stunting problems by

Luthfia Bakari, Cs: Analisis Implementasi Kebijakan Percepatan Page 1219

improving coordination in all regional apparatuses related to stunting. Public education is needed about the importance of eating nutritious foods with a balanced nutritional pattern. Improvement from the downstream side, namely by increasing agricultural production through intensification and extensification of agricultural cultivation, as well as providing decent jobs for the community, so as to increase people's purchasing power.

Keywords: *Implementation, Policy, Stunting, Implications, Independence*

PENDAHULUAN

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang memerlukan penanganan terintegrasi dan menyeluruh. Stunting menurut (Supariasa, D. N., & Purwaningsih, 2019) adalah kondisi perkembangan anak balita yang gagal karena adanya kekurangan gizi kronis, rendahnya stimulus psikososial, serta paparan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000 HPK). Stunting selama ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa stunting adalah hal biasa, dan masih adanya anggapan bahwa stunting adalah genetik (Yuliastini, S. R. I., Sudiarti, T., Sartika, 2020). Menurut WHO pengertian *stunting* yaitu anak yang mengalami cacat pertumbuhan dan perkembangannya. Anak mengalami kekurangan gizi buruk, infeksi berulang dan stimulasi psikologisosial yang tidak memadai (Kwami, C. S., Godfrey, S., Gavilan, H., Lakhanpaul, M., & Parikh, 2019) . Stunting dikatakan sebagai penyakit infeksi kronis yang ditunjukkan dengan nilai z-skor tinggi badan untuk umur (TB/U) < -2SD. Balita dikatakan stunting apabila memiliki nilai z skor di bawah garis normal yaitu kurang dari -2SD, yang biasa dikatakan balita pendek. Sedangkan apabila kurang dari -3SD maka balita dikategorikan sangat pendek (Kemenkes RI, 2019).

Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah daerah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Gorontalo yang memiliki modal sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis, struktur demografis penduduk dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta variabilitas daya kreasi yang tidak terbatas. Dengan karakteristik tersebut, terdapat 2 (dua) keunggulan wilayah Kabupaten Bone Bolango dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Provinsi Gorontalo. Keunggulan tersebut yakni (1) keunggulan lokasi (*locational advantage*) dengan aksesibilitas yang sangat tinggi dengan pusat pelayanan pemerintahan dan social ekonomi, dan (2) keunggulan sumber daya alam (*natural resources advantage*) yang merupakan potensi besar bagi penguatan kapabilitas wilayah yang kompetitif (*competitive regional capability*). Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang mempunyai nilai strategis dan sangat prospektif disamping sebagai sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. (Kolaboratif et al., n.d.)

Dalam bidang kesehatan, berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Provinsi Gorontalo menurun dari 34,89% tahun 2019 menjadi 29% pada tahun 2021. Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi, yakni mencapai 34,6%. Disusul oleh Kabupaten Boalemo dengan angka 29,8%, Gorontalo Utara 29,5%, Kabupaten Gorontalo 28,3%, dan Kota Gorontalo 26,5%. Sedangkan Angka prevalensi stunting terendah dicapai oleh Kabupaten Bone Bolango sebesar 25,1%. Berdasarkan data dinas kesehatan kabupaten Bone Bolango, angka prevalensi stunting di Bone Bolango yaitu 25,1 persen. Angka itu masih di atas angka standar yang ditoleransi World Health Organization (WHO), yaitu di bawah 20 persen. Data tiga tahun menunjukkan penderita stunting mengalami kenaikan yang signifikan yaitu tahun 2020 sebanyak 1.075 kasus, tahun 2021, 1.140 kasus, dan ditahun 2022 sebanyak 1.190 kasus. Pencegahan serta penanggulangan stunting telah menjadi program prioritas dan tertuang salah satunya dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Penanggulangan Stunting, yang selanjutnya RAD tersebut di Perbupkan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango. (*Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Bone Bolango.Pdf*, n.d.)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada fenomena alamiah dan menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten Bone Bolango dan Implikasi kebijakan terhadap Kemandirian kesehatan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yakni komitmen pemerintah, Sumber daya dan peran serta masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan Observasi, Wawancara dan telaah dokumen. Analisis data dengan metode triangulasi data berupa pengumpulan data, reduksi dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian Kabupaten Bone Bolango provinsi Gorontalo dengan waktu penelitian selama 3 bulan yakni dari bulan Juli-September 2023.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gizi merupakan faktor penting karena secara langsung berpengaruh terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), oleh karena itu perlu pelayanan gizi yang berkualitas pada individu dan masyarakat. Pelayanan gizi merupakan salah satu sub-sistem dalam pelayanan kesehatan paripurna, yang berfokus kepada

keamanan pasien. Dengan demikian pelayanan gizi wajib mengacu kepada standar yang berlaku. Mengingat masih dijumpai kejadian malnutrisi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya khususnya stunting, maka perlu upaya pendekatan yang lebih strategis.

Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting

Pencegahan dan penanggulangan stunting secara nasional tertuang dalam peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi. Kebijakan ini menyebutkan secara eksplisit tujuan kebijakan (pasal 2) yaitu untuk menjamin setiap orang memiliki akses terhadap informasi gizi dan pendidikan gizi, pangan yang bergizi serta mendapat pelayanan gizi dan kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi dan peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (Kemenkes RI, 2014).

Di kabupaten Bone Bolango kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat terkait pencegahan dan penanggulangan stunting tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango. Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan pemerintah kabupaten Bone Bolango dalam pencegahan stunting adalah memperkuat kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait. Selain itu pemda melalui dinas kesehatan Bone Bolango melaksanakan Intervensi spesifik dan sensitive, pemberian makanan bergizi melalui kegiatan posyandu secara berkala setiap bulannya, rembuk stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen stunting, serta program Dusun Bebas Stunting.

Efektivitas Implementasi Kebijakan stunting

Implementasi kebijakan dapat dinilai kinerjanya melalui keberhasilan dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan yang realistis. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit juga untuk dapat melaksanakannya. Sehingga untuk dapat melihat kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya melalui standar dan sasaran dalam memberikan penjelasan terkait peraturan yang menjadi landasan implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan apakah para pelaksana kebijakan mengetahui dan memahami dengan baik apa yang menjadi tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diperoleh keterangan bahwa standar dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting, pemerintah kabupaten Bone Bolango sudah memiliki standar yakni dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang

Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango yang sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI No. 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi yang sekarang digantikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Jika dilihat adanya peraturan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang percepatan pencegahan stunting terintegrasi sudah cukup efektif untuk dijadikan landasan oleh para pelaksana dalam menjalankan kebijakan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi di Kabupaten Bone Bolango bertujuan untuk memperbaiki mutu gizi masyarakat dan mengatasi masalah stunting yang terjadi di wilayah kabupaten Bone Bolango yang harus diatasi secara multisektoral. Sebanyak 1.190 anak di Kabupaten Bone Bolango berstatus stunting. Catatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda-Litbang) secara rinci, jumlah itu tersebar di 22 desa dalam 8 kecamatan.

Komitmen Pemerintah

Sasaran dari dibentuknya kebijakan percepatan pencegahan stunting ini ditujukan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang berada di tingkat Kabupaten Bone Bolango sampai ke tingkat desa dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021, sasaran masyarakat terdiri dari kelompok sasaran dari kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan dari kegiatan Intervensi Gizi Sensitif. Para pelaksana sudah memahami standar dan tujuan serta sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi dan sudah dijalankan, namun masih terdapat OPD yang tidak dapat menjelaskan dengan baik terkait standar, tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan percepatan pencegahan stunting, pemahaman terkait standar, tujuan dan sasaran belum seragam di beberapa OPD yang terkait.

Penanganan stunting merupakan program strategis pemerintah yang harus terus dikerjakan hingga mencapai target yang diharapkan. Artinya program penanganan stunting sebagai program prioritas memerlukan anggaran yang cukup besar. Jika ada Kementerian/Lembaga atau Pemda yang melakukan realokasi dana stunting, maka hal tersebut merupakan pelanggaran serius dan harus dikenakan sanksi tegas demi masa depan anak-anak Indonesia (Catatan et al., 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam mengatasi stunting sangat tergantung pada komitmen pemimpin daerah tersebut. Pengalaman di negara Peru membuktikan bahwa peran kepemimpinan yang tinggi mampu menurunkan prevalensi stunting dari 28,5% pada tahun 2007 menjadi 14,4% pada

2015. Demikian pula di negara Brazil, komitmen dan kepemimpinan presiden yang memprioritaskan upaya peningkatan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan mampu menurunkan prevalensi stunting dari 37% menjadi 7% dalam kurun waktu 30 tahun (Sugianto, 2021)

Tantangan utama penanggulangan stunting adalah lemahnya koordinasi di tingkat OPD sekabupaten. Bappeda seharusnya secara teratur berkoordinasi dengan berbagai sektor memantau pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), tetapi yang dilakukan Bappeda umumnya hanya terbatas pada pemantauan anggaran saja (*Institute of Social and Economic Research, 2018 Unpublished*). Hasilnya adalah masing-masing sektor mengelola program mereka secara mandiri tanpa integrasi yang tepat (Sugianto, 2021).

Pelaksana program atau implementor merupakan faktor yang menentukan suatu kebijakan publik sulit atau tidak dilaksanakan. Pelaksana program penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh lintas sektor dan sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik itu TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan. TPPS memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Dalam perencanaan program aksi untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui tahap analisis situasi dengan melihat data sasaran kemudian dilakukan penyusunan rencana program. Pemerintah kabupaten Bone Bolango sudah melaksanakan delapan aksi konvergensi sejak ditetapkannya Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten lokus prioritas stunting. Delapan aksi konvergensi tersebut yaitu Analisis Situasi, Perencanaan Kegiatan, Rembug Stunting, Pembuatan Peraturan daerah, Pembinaan Pembangunan Kader Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan Review Kinerja Tahunan. (Candarmaweni & Rahayu, 2020). Pelaksanaan program penanggulangan stunting sudah dilakukan mulai dari ranah remaja, seperti remaja diberikan tablet tambah darah terutama remaja putri, adanya posyandu remaja, dan pelaksanaan penjarangan kesehatan anak sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sekaligus pemberian edukasi. Untuk ibu hamil implementasinya adalah ANC terpadu, kelas ibu hamil dengan kegiatan seperti senam ibu hamil dan penyampaian materi mengenai perawatan kehamilan, materi mengenai perawatan bayi dasar dan lain-lain, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK, pemberian IMD, pemantauan pertumbuhan di posyandu sekaligus PMT untuk balita, pemberian Vitamin A dan pemberian obat cacing. Di beberapa desa juga terdapat program BKB (Bina

Keluarga Balita), program kelas balita dan kelas balita gizi buruk. Kegiatan tersebut dilakukan dengan sasaran ibu balita sebagai upaya pencegahan stunting di tingkat desa.

Sumber Daya

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan senantiasa menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan ketersediaan akan sumber daya yang memadai. Menurut (Van Meter dan Van Horn, 1975) keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial/anggaran. Ketersediaan sumber daya manusia yang disertai dengan kompetensi serta kapabilitas yang sesuai dengan bidangnya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi suatu hal yang penting untuk menentukan keberhasilan dalam setiap proses pengimplementasian kebijakan. Ketersediaan sumber daya sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kebijakan, adapun sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya sarana prasarana, sumber pembiayaan dan sumber daya manusia yang terlibat (Novita, 2021). Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango secara jumlah telah mencukupi, seperti jumlah tenaga gizi di tiap puskesmas, dokter, perawat serta bidan sudah sesuai dengan peraturan mengenai jenis tenaga kesehatan wajib di puskesmas yaitu minimal terdapat satu tenaga gizi dan dokter, minimal terdapat 5 orang perawat dan minimal 4 orang bidan (Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019, 2019). Selain tenaga kesehatan, dalam upaya penanggulangan stunting juga didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader posyandu dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa untuk jumlah kader posyandu juga sudah mencukupi dimana masing-masing desa untuk 1 pos posyandu terdapat 3-5 kader posyandu dan kader TPK berjumlah 720 Orang yang tersebar di seluruh desa.

Selain kuantitas yang perlu diperhatikan dalam sumber daya manusia adalah kualitas atau kompetensi serta kapabilitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terkait kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan kebijakan percepatan pencegahan stunting, kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat masih kurang, dilihat dari pemahaman dalam pencegahan stunting yang masih rancu dengan gizi buruk. Selain itu terkait kompetensi kader dimasing-masing kecamatan belum mampu memanfaatkan dan memahami teknologi dengan baik

dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu dan anak sebagai upaya pencegahan stunting, sehingga untuk dapat mencapai inputan secara menyeluruh dengan cepat dan tepat membutuhkan waktu yang lama.

Problematika stunting menyebabkan kesenjangan kesejahteraan yang semakin buruk. Stunting dapat menyebabkan kemiskinan antar generasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan kesehatan stunting kini menjadi isu pembangunan ekonomi. Dengan meringkaskan stunting sebagai isu produktivitas sumber daya manusia, masalah ini dijadikan ‘kambing hitam’ untuk lemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia (Prastyani, 2019).

Dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas gizi, Dinas kesehatan telah melakukan pelatihan-pelatihan di antaranya pelatihan Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), pelatihan penggunaan alat antropometri, pelatihan konseling, pelatihan Antenatal Care (ANC) terpadu, dan pelatihan lainnya yang menunjang dalam pelaksanaan penanggulangan stunting.

Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting dilakukan melalui program Posyandu. Pencegahan stunting dapat dioptimalkan dengan lebih mengaktifkan peran penyuluhan gizi di posyandu dan pemberian PMT (Sugianto, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga memiliki peran penting dalam menyukseskan upaya antisipasi dan penurunan tingkat stunting pada anak baduta dan anak balita di Indonesia. Bentuk keterlibatan PAUD dalam upaya tersebut adalah dengan mengoptimalkan penerapan program PAUD berbasis Holistik Integratif (Sugianto, 2021). Lingkungan sosial sangat diperlukan demi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, karena keberadaan suatu kebijakan di masyarakat perlu mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial (Sunaryo et al., 2022). Salah satu instrumen lingkungan sosial yakni terkait partisipasi dan pandangan masyarakat terhadap pengimplementasian suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa masyarakat telah ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango, namun tidak dipungkiri masih terdapat juga masyarakat yang belum berpartisipasi sepenuhnya dan memahami dengan baik terkait pencegahan stunting karena terbatasnya pengetahuan terhadap pola asuh yang baik dan pengetahuan terkait asupan yang bergizi. Asupan makanan bergizi yang tidak seimbang ini termasuk dalam pemberian ASI eksklusif yang tidak diberikan selama 6 bulan. Selain itu tingkat pendidikan orang tua yang memiliki anak stunting rata-rata berada pada tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang. Jika tingkat

pengetahuan orang tua rendah ditambah dengan pola asuh yang kurang, sehingga sangat berisiko terjadinya stunting pada anak. Oleh karena itu dalam mendukung kondisi lingkungan sosial masyarakat pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui Dinas kesehatan kerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa mengupayakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu terkait pemberian ASI melalui kegiatan KP-ASI. Pemberian kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan ibu tidak cukup jika hanya mengandalkan dari satu sektor saja perlu adanya komitmen dari pelaksana lainnya dalam meningkatkan kondisi sosial yang berada di Kabupaten Bone Bolango.

Terkait lingkungan ekonomi di Kabupaten Bone Bolango rata-rata anak yang mengalami stunting di Kabupaten Bone Bolango berasal dari tingkat penghasilan atau perekonomian keluarga yang rendah. Kondisi lingkungan ekonomi rendah yang berada pada tatanan suatu keluarga mengakibatkan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok keluarga khususnya pada asupan makanan yang bergizi untuk anaknya. Asupan gizi yang kurang akibat kemiskinan dalam jangka waktu yang panjang ini yang menimbulkan kejadian stunting. Bahwasannya lingkungan ekonomi yang dikaitkan dengan kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah gizi kurang di Indonesia (Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, 2022). Oleh karena itu dalam membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi yang mendukung pengimplementasian kebijakan percepatan pencegahan stunting terintegrasi melalui pemberian bantuan secara langsung, selain itu mengupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membantu meningkatkan kondisi lingkungan ekonomi, yang dilakukan oleh puskesmas-puskesmas di kabupaten Bone Bolango melalui kegiatan seperti Pos Gizi, One day One Egg (ENDOG) dan kegiatan lainnya. Namun dalam pelaksanaan suatu kegiatan tentu saja terkadang terdapat kendala yang dihadapi, contohnya pada kegiatan pemberian One Day One Egg (ENDOG) karena rendahnya perekonomian yang dialami oleh suatu keluarga mengakibatkan pemberian 30 butir telur yang seharusnya dapat maksimal diberikan selama 1 bulan penuh kepada anaknya yang mengalami stunting, namun telur tersebut dimakan secara bersama-sama oleh keluarganya, karena keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan betapa berpengaruhnya lingkungan ekonomi dalam mendukung pencegahan stunting.

Rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat akibat kurangnya keterampilan individu dalam mencari nafkah yang diperparah oleh kurangnya pengetahuan tentang cara memilih bahan makanan, kurangnya keterampilan memasak untuk menyiapkan makanan sehat yang murah (Sugianto, 2021).

Representasi kebijakan sosial memberikan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menciptakan perubahan kebijakan sosial. Meskipun ada peran pemerintah dalam penyediaan dana untuk program pendidikan, tanggung jawab utama tetap pada masing-masing individu dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan terkait pangan (Sudiono, n.d.)

Gambar 1.1
Siklus stunting



Implikasi kebijakan pencegahan Stunting terhadap Kemandirian kesehatan

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu tertentu. Stunting dimulai ketika masih dalam bentuk janin alias pada saat masa kehamilan. Kurangnya asupan gizi pada ibu hamil mengakibatkan melahirkan bayi dalam keadaan berat badan rendah dan pendek. Idealnya bayi terlahir dengan berat badan minimal 2500 gr dan tinggi 48cm. Stunting bahkan bisa dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama ini dimulai ketika sang ibu hamil (270 hari) hingga sampai bayi berumur dua tahun (730 hari). Masa ini adalah masa keemasan pertumbuhan anak. Dampak Akibat dari stunting adalah sebagai berikut:

Menurunnya Produktifitas

Penelitian menyebutkan anak yang terkena stunting saat dewasa kelak berpotensi memiliki penghasilan rendah setidaknya 20% lebih kecil dibanding anak yang tidak terkena stunting. Hal ini di akibatkan oleh lemahnya daya tangkap dan kondisi fisik anak stunting.

Menurunnya Prestasi

Rendahnya asupan gizi pada anak stunting tak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik tapi juga otaknya. Hal ini berakibat pada perkembangan IQ nya yang tidak maksimal. Akibatnya prestasi akademiknya akan rendah.

Menurunnya Kemampuan Bersaing

Anak stunting akan tertinggal dalam bersaing. Ia akan mengalami kekalahan demi kekalahan akibat perkembangan fisik dan otaknya yang tidak sempurna. Tentu ini akan mengancam keberadaannya dalam daya saing global yang berimbas pada kehidupannya.

Merusak Ekonomi Masyarakat dan Negara

Ketidampakannya dalam bersaing membuatnya akan tersisih. Hal ini menyebabkan ia akan menjadi beban negara dan masyarakat.

Beresiko Mengalami Penyakit Kronis Ketika Dewasa

Metabolismenya yang tidak berkembang sempurna menjadikan anak stunting berpotensi terkena penyakit serius seperti diabetes, jantung, kanker dan penyakit serius lainnya.

Pemerintah kabupaten Bone Bolango telah melaksanakan tindakan prevensi untuk mencegah dan melakukan penanganan penderita stunting yaitu dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Bone Bolango Nomor 77 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting di Kabupaten Bone Bolango. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bone Bolango adalah memperkuat kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait. Selain itu pemda melalui dinas kesehatan Bone Bolango melaksanakan Intervensi spesifik dan sensitive, pemberian makanan bergizi melalui kegiatan posyandu secara berkala setiap bulannya, program Ijab Kabul yakni program nikah sehat, tanggung jawab bersama menuju keluarga bahagia unggul dan berkualitas, Gerakan Aksi di Desa Mengatasi dan Mengintervensi Stunting serta program Dusun Bebas Stunting. Pelaksana program penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dilakukan oleh lintas sektor dan sudah terbentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) baik itu TPPS Kabupaten, TPPS Kecamatan. TPPS memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

Dalam perencanaan program aksi untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango dilakukan melalui tahap analisis situasi dengan melihat data sasaran kemudian dilakukan penyusunan rencana program. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sudah melaksanakan delapan aksi konvergensi sejak ditetapkannya Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten lokus prioritas stunting. Delapan aksi konvergensi tersebut yaitu Analisis Situasi, Perencanaan Kegiatan, Rembug Stunting, Pembuatan Peraturan daerah, Pembinaan Pembangunan Kader Manusia, Sistem Manajemen Data Stunting, Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan Review Kinerja Tahunan.

Berdasarkan hasil wawancara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango secara jumlah telah mencukupi, seperti jumlah tenaga gizi di tiap puskesmas, dokter, perawat serta bidan sudah sesuai dengan peraturan mengenai jenis tenaga kesehatan wajib di puskesmas yaitu minimal terdapat satu tenaga gizi dan dokter, minimal terdapat 5 orang perawat dan minimal 4 orang bidan (21). Selain tenaga kesehatan, dalam upaya penanggulangan stunting juga didukung oleh tenaga di luar kesehatan seperti kader posyandu dan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), jumlah kader posyandu juga sudah mencukupi dimana masing-masing desa untuk 1 pos posyandu terdapat 3-5 kader posyandu dan kader TPK berjumlah 720 Orang yang tersebar di seluruh desa. Sumber pendanaan untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Bone Bolango berasal dari di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) dana APBD dan APBN untuk Pemberian makanan tambahan (PMT) dan Pemenuhan kebutuhan di lapangan, dana desa dari masing-masing desa untuk kegiatan kelas balita dan kelas ibu hamil serta PMT lokal.

Diperlukan peran nyata dari pemerintah yaitu kerjasama dan sinergi yang baik antara pemerintah/instansi terkait dengan percepatan pencegahan dan penanggulangan stunting, sehingga kemandirian kesehatan dapat diwujudkan. Meningkatkan upaya koordinasi dan komunikasi lintas sektor baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman terkait penanggulangan stunting di semua sektor dan lapisan masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengukuran sebagai upaya deteksi dini, dan melakukan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan melaksanakan pelatihan seperti pelatihan penggunaan alat antropometri bagi kader posyandu.

SIMPULAN

Secara umum implementasi kebijakan sosial pencegahan stunting di Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik. kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting lebih menekankan kepada aspek komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah serta peran serta masyarakat sebagai isu utama. Pemerintah kabupaten Bone Bolango diharapkan agar tetap menjaga komitmen dalam mengatasi masalah stunting dengan cara meningkatkan koordinasi pada semua perangkat daerah yang terkait dengan stunting. Dibutuhkan pendidikan publik tentang pentingnya makan makanan bergizi dengan pola gizi seimbang. Perbaikan dari sisi hilir, yaitu dengan peningkatan hasil produksi pertanian melalui intensifikasi dan ekstensifikasi budi daya pertanian, serta menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Candarmaweni, & Rahayu, A. Y. S. (2020). Tantangan Pencegahan Stunting Pada Era Adaptasi Baru “New Normal” Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Pandeglang (the Challenges of Preventing Stunting in Indonesia in the New Normal Era Through Community Engagement). *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(3), 136–146. <https://journal.ugm.ac.id/jkki/article/view/57781>
- Catatan, S., Dipelajari, U., Senior, P., & Lingkungan, M. (2021). *Agus pambagio*: 39–43.
- Kemenkes RI. (2019). Injeksi 2018. In *Health Statistics*. <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/profil-kesehatan-indonesia-2018.pdf>
- Kolaboratif, P., Blu, D., Di, P., Bone, K., Tui, F. P., Pd, S., Tim, M. S. K., Nani, Y. N., Sos, S., Tim, M. S. A., & Gorontalo, U. N. (n.d.). *Pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam meningkatkan fungsi pengawasan di kecamatan bone bolango*.
- Kwami, C. S., Godfrey, S., Gavilan, H., Lakhampaul, M., & Parikh, P. (2019). Water, Sanitation, and Hygiene: Linkages with Stunting in Rural Ethiopia. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 16(3793), 2–21. <https://doi.org/10.3390/ijerph16203793>.
- Novita, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Public Health Perspective Journal*, 11(01), 1–13.
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Percepatan penurunan dan pencegahan stunting di kabupaten Bone Bolango.pdf*. (n.d.).
- Prastyani. (2019). Memburu stunting: Wacana pembangunan kesehatan Jokowi dan diskriminasi fisik untuk pekerjaan. In <https://theconversation.com/memburu-stuntingwacana-pembangunan-kesehatan-jokowi-dan-diskriminasi-fisik-untuk-pekerjaan-116184>.
- Shauma, Udzu Nabila & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 97–104.
- Sudiono, L. (n.d.). *Model partisipasi masyarakat*.
- Sugianto, A. (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial*, Vol. 1(No. 3), Halaman 197-209.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (23rd ed.).

Alfabeta, CV.

- Sunaryo, D. R., Candradewini, C., & Arifianti, R. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Bandung. *Responsive*, 4(4), 205. <https://doi.org/10.24198/responsive.v4i4.34716>
- Supariasa, D. N., & Purwaningsih, H. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita di kabupaten malang. *E-Jurnal Inovasi Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 55–64. <https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/21/14>
- Van Meter dan Van Horn. (1975). *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*.
- Yuliastini, S. R. I., Sudiarti, T., Sartika, R. A. D. (2020). Factors Related to Stunting among Children Age 6-59 Months in Babakan Madang Sub-District, West Java, Indonesia. *Current Research in Nutrition and Food Science Journal*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.8.2.10>